



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan berprinsip pada berkepastian hukum, perlu menerapkan 7 (tujuh) prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 telah menegaskan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menambahkan jumlah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya dan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Daerah

Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 2

Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 3

Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 5

- (1) Daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan peta daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peta daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi Per Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan)
26	Sulawesi Selatan	1 Kab. Kepulauan Selayar	25	Kepulauan Selayar 1	4	Benteng
				Kepulauan Selayar 2	6	1. Bontomatene 2. Bontomanai 3. Buki
				Kepulauan Selayar 3	3	1. Pasimarannu 2. Pasilambena
				Kepulauan Selayar 4	6	1. Pasimasunggu 2. Taka Bonerate 3. Pasimasunggu Timur
				Kepulauan Selayar 5	6	1. Bontoharu 2. Bontosikuyu
		2 Kab. Bulukumba	40	Bulukumba 1	9	1. Ujung Bulu 2. Ujungloe
				Bulukumba 2	10	1. Gantorang 2. Kindang
				Bulukumba 3	9	1. Bulukumpa 2. Rilauale
				Bulukumba 4	7	1. Herliang 2. Kajang
				Bulukumba 5	5	1. Bonto Bahari 2. Bonto Tiro
		3 Kab. Bantaeng	30	Bantaeng 1	9	1. Bantaeng 2. Eremerasa
				Bantaeng 2	9	1. Bissappu 2. Uluere 3. Sinoa
				Bantaeng 3	7	1. Tompo Bulu 2. Gantarang Keke
				Bantaeng 4	5	Pajukukang
		4 Kab. Jeneponto	40	Jeneponto 1	10	1. Binamu 2. Turatea
				Jeneponto 2	9	1. Tamalatea 2. Bontoramba
				Jeneponto 3	9	1. Bangkala 2. Bangkala Barat
				Jeneponto 4	5	1. Kelara 2. Rumbia
				Jeneponto 5	7	1. Batang 2. Arungkeke 3. Tarowang
		5 Kab. Takalar	35	Takalar 1	10	1. Polongbangkeng Utara 2. Pattalassang 3. Polongbangkeng Timur
				Takalar 2	8	1. Mangarabombang 2. Polongbangkeng Selatan 3. Laikang
				Takalar 3	7	1. Mappakasunggu 2. Galesong Selatan 3. Sanrobone 4. Kepulauan Tanakeke
				Takalar 4	10	1. Galesong Utara 2. Galesong

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi Per Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan)
		6 Kab. Gowa	45	Gowa 1	9	Somba Opu
				Gowa 2	6	1. Parangloe 2. Bontomarannu 3. Pattalasang 4. Manuju
				Gowa 3	4	1. Tinggimoncong 2. Tombolopao 3. Parigi
				Gowa 4	6	1. Tompobullu 2. Bungaya 3. Biringbulu 4. Bontolempangang
				Gowa 5	4	1. Bontonompo 2. Bontonompo Selatan
				Gowa 6	6	1. Bajeng 2. Bajeng Barat
				Gowa 7	10	1. Palangga 2. Barombong
		7 Kab. Sinjai	30	Sinjai 1	9	1. Sinjai Utara 2. Bulupoddo 3. Pulau Sembilan
				Sinjai 2	8	1. Sinjai Timur 2. Tellu Limpoe
				Sinjai 3	7	1. Sinjai Selatan 2. Sinjai Borong
				Sinjai 4	6	1. Sinjai Barat 2. Sinjai Tengah
		8 Kab. Bone	45	Bone 1	10	1. Palakka 2. Tanete Riattang 3. Tanete Riattang Barat 4. Tanete Riattang Timur
				Bone 2	9	1. Tonra 2. Mare 3. Sibulue 4. Barebbo 5. Cina 6. Ponre
				Bone 3	9	1. Bontocani 2. Kahu 3. Kajuara 4. Salomekko 5. Libureng 6. Patimpeng
				Bone 4	8	1. Lappariaja 2. Lamuru 3. Ulaweng 4. Amali 5. Tellulimpoe 6. Bengo
				Bone 5	9	1. Awangpone 2. Tellu Siattinge 3. Ajangale 4. Dua Boccoe 5. Cenrana

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi Per Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan)
		9 Kab. Maros	35	Maros 1	7	1. Maros Baru 2. Turikale
				Maros 2	5	1. Bontoa 2. Lau
				Maros 3	5	1. Bantimurung 2. Simbang
				Maros 4	4	1. Camba 2. Mallawa 3. Cenrana
				Maros 5	6	1. Tanralili 2. Tompobulu 3. Moncong Loe
				Maros 6	8	1. Mandai 2. Marusu
		10 Kab. Pangkajene Kepulauan	35	Pangkajene Kepulauan 1	10	1. Pangkajene 2. Balocci 3. Minasa Tene
				Pangkajene Kepulauan 2	11	1. Bungoro 2. Labakkang 3. Tondong Tallasa
				Pangkajene Kepulauan 3	7	1. Marang 2. Segeri 3. Mandalle
				Pangkajene Kepulauan 4	4	1. Liukang Tangaya 2. Liukang Kalmas
				Pangkajene Kepulauan 5	3	1. Liukang Tupabbiring 2. Liukang Tupabbiring Utara
		11 Kab. Barru	25	Barru 1	6	Barru
				Barru 2	5	1. Soppeng Riaja 2. Balusu
				Barru 3	4	Mallusetasi
				Barru 4	5	1. Tanete Riaja 2. Pujananting
				Barru 5	5	Tanete Rilau
		12 Kab. Soppeng	30	Soppeng 1	6	Lalabata
				Soppeng 2	7	1. Marioriawa 2. Donri Donri
				Soppeng 3	6	1. Lilirilau 2. Ganra
				Soppeng 4	5	1. Liliraja 2. Citta
				Soppeng 5	6	Marioriwawo
		13 Kab. Wajo	40	Wajo 1	7	Tempe
				Wajo 2	7	1. Majauleng 2. Tanasitolo
				Wajo 3	6	1. Belawa 2. Maniangpajo 3. Gilireng
				Wajo 4	6	1. Pitumpanua 2. Keera
				Wajo 5	8	1. Takkalalla 2. Sajoanging 3. Bola 4. Penrang
				Wajo 6	6	1. Sabangparu 2. Pammana

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi Per Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan)
		14 Kab. Sidenreng Rappang	35	Sidenreng Rappang 1	8	1. Maritengngae 2. Watang Sidenreng
				Sidenreng Rappang 2	9	1. Panca Lautang 2. Tellu Limpoe 3. Watang Pulu
				Sidenreng Rappang 3	9	1. Baranti 2. Panca Rijang 3. Kulo
				Sidenreng Rappang 4	9	1. Dua Pitue 2. Pitu Riawa 3. Pitu Riase
		15 Kab. Pinrang	40	Pinrang 1	8	1. Watang Sawito 2. Tiroang
				Pinrang 2	6	1. Suppa 2. Mattiro Bulu
				Pinrang 3	5	1. Matirro Sompe 2. Lanrisang
				Pinrang 4	7	1. Duampanua 2. Cempa
				Pinrang 5	6	1. Lembang 2. Batu Lappa
				Pinrang 6	8	1. Patampanua 2. Paleteang
		16 Kab. Enrekang	30	Enrekang 1	10	1. Maiwa 2. Enrekang 3. Cendana
				Enrekang 2	11	1. Baraka 2. Anggeraja 3. Bungin 4. Malua 5. Buntu Batu
				Enrekang 3	9	1. Alla 2. Curio 3. Masalle 4. Baroko
		17 Kab. Luwu	35	Luwu 1	5	1. Belopa 2. Kamanre 3. Belopa Utara
				Luwu 2	3	1. Suli 2. Suli Barat
				Luwu 3	4	1. Larompong 2. Larompong Selatan
				Luwu 4	4	1. Basse Sangtempe 2. Bajo 3. Latimojong 4. Bajo Barat 5. Basse Sangtempe Utara
				Luwu 5	5	1. Lamasi 2. Walenrang Utara 3. Lamasi Timur
				Luwu 6	4	1. Walenrang 2. Walenrang Barat 3. Walenrang Timur
				Luwu 7	6	1. Bua 2. Ponrang

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi Per Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan)
				Luwu 8	4	1. Bua Ponrang 2. Ponrang Selatan
		18 Kab. Tana Toraja	30	Tana Toraja 1	6	1. Makale 2. Makale Selatan
				Tana Toraja 2	7	1. Mengkendek 2. Gandangbatu Sillanan
				Tana Toraja 3	3	1. Bonggakaradeng 2. Simbuang 3. Mappak 4. Rano
				Tana Toraja 4	5	1. Saluputi 2. Bittuang 3. Masanda 4. Kurra
				Tana Toraja 5	5	1. Rantetayo 2. Rembon 3. Malimbong Balepe
				Tana Toraja 6	4	1. Sangalla 2. Makale Utara 3. Sangalla Selatan 4. Sangalla Utara
		19 Kab. Luwu Utara	35	Luwu Utara 1	7	1. Masamba 2. Rampi 3. Mappedeceng
				Luwu Utara 2	5	1. Sukamaju 2. Sukamaju Selatan
				Luwu Utara 3	6	1. Bone Bone 2. Tana Lili
				Luwu Utara 4	6	1. Malangke 2. Malangke Barat
				Luwu Utara 5	6	1. Sabbang 2. Limbong 3. Seko 4. Sabbang Selatan
				Luwu Utara 6	5	1. Baebunta 2. Baebunta Selatan
		20 Kab. Luwu Timur	35	Luwu Timur 1	8	1. Malili 2. Wasuponda
				Luwu Timur 2	4	1. Angkona 2. Kalaena
				Luwu Timur 3	8	1. Wotu 2. Burau
				Luwu Timur 4	7	1. Mangkutana 2. Tomoni 3. Tomoni Timur
				Luwu Timur 5	8	1. Nuha 2. Towuti
		21 Kab. Toraja Utara	30	Toraja Utara 1	7	1. Rantepao 2. Tikala 3. Tallunglipu
				Toraja Utara 2	6	1. Sesean 2. Sa'Dan 3. Balusu 4. Bangkelekila 5. Sesean Suloara

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi Per Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan)	
				Toraja Utara 3	5	1. Nanggala 2. Buntao 3. Tondon 4. Rantebua	
				Toraja Utara 4	6	1. Sanggalangi 2. Sopai 3. Kesu	
				Toraja Utara 5	6	1. Rindingallo 2. Dende' Piongan Napo 3. Buntu Pepasan 4. Baruppu 5. Kapala Pitu 6. Awan Rante Karua	
		22	Kota Makassar	50	Kota Makassar 1	9	1. Makassar 2. Ujung Pandang 3. Rappocini
					Kota Makassar 2	10	1. Wajo 2. Bontoala 3. Tallo 4. Ujung Tanah 5. Kepulauan Sangkarrang
					Kota Makassar 3	11	1. Biringkanaya 2. Tamalanrea
					Kota Makassar 4	10	1. Panakkukang 2. Manggala
					Kota Makassar 5	10	1. Mariso 2. Mamajang 3. Tamalate
		23	Kota Pare Pare	25	Kota Pare Pare 1	7	Bacukiki Barat
					Kota Pare Pare 2	4	Bacukiki
					Kota Pare Pare 3	6	Ujung
					Kota Pare Pare 4	8	Soreang
		24	Kota Palopo	25	Kota Palopo 1	7	1. Wara 2. Wara Utara
					Kota Palopo 2	8	1. Wara Selatan 2. Wara Timur
Kota Palopo 3	4				1. Wara Barat 2. Sendana 3. Mungkajang		
Kota Palopo 4	6				1. Telluwanua 2. Bara		
27	Sulawesi Tenggara	1 Kab. Kolaka	30	Kolaka 1	9	1. Kolaka 2. Latambaga	
				Kolaka 2	8	1. Wundulako 2. Pomalaa 3. Baula	
				Kolaka 3	6	1. Watubangga 2. Tanggetada 3. Toari 4. Polinggona	